



■ ■ ■

Peraturan Bupati Bandung

Perubahan Renstra PD

2021 - 2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasai Daerah
Pemerintah Kabupaten Bandung





BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perubahan perkembangan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 – 2026.**

Pasal 1

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 92) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Januari 2024



BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Januari 2024



CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 28

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANDUNG NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2021 - 2026**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026**

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra BAPPERUDA
Kabupaten : Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah kabupaten	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupatensesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	√			
20	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	√			

20240610 Januari 2024
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG,

DR. IL. FAWIN RINALDI., M. Sc
Ketua Muda/ IVc
NIP. 19671110 199303 1 012



Peraturan Bupati Bandung

Perubahan Renstra PD

2021-2026

BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG
Kabupaten Bandung





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAPPERIDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bapkabbdg@yahoo.com
[Website: BAPPERIDA.bandungkab.go.id](http://Website.BAPPERIDA.bandungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 000.7.2 / 09 / 50426

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BAPPERIDA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023;

- KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Tahun 2021-2026 ditetapkan.

Ditetapkan : di Soreang
Pada tanggal : 03 Januari 2024


KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG,

Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M. Sc
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19671110 199303 1 012

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 000.7-2/09/SEKRET
TANGGAL : 03 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026**

Jabatan dalam Tim

Nama/Jabatan

Pengarah : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Ketua : Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan;
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. Perencana Ahli Muda pada Penyusunan Program;
7. Kasubbagian Umum dan Kepegawaian;
8. Kasubbagian Keuangan;
9. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan;
10. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan
Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi;
11. Perencana Ahli Muda Bidang Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Pemerintahan;
12. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah;
13. Analis Kebijakan Bidang Penelitian dan
Pengembangan.

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG,

Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M. Sc
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19671110 199303 1 012

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 000-7-2/09 / 50480T
TANGGAL : 03 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026**

1. PENGARAH:

- Memberikan arahan, masukan, dan saran kepada Tim dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Menetapkan rumusan kebijakan dalam Penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

2. KETUA:

- Melaksanakan pengendalian terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala BAPPERIDA;
- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

3. ANGGOTA:

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra BAPPERIDA sebelumnya;
- Berpartisipasi secara aktif dan memberi masukan dalam rapat pimpinan dan/atau rapat pembahasan penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan pembahasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan umum, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan pada Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Menelaah dan mengoreksi isi dan substansi Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
- Melaporkan hasil kerja anggota kepada Ketua;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung 2021-2026;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Bandung;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

- Melaksanakan penyempurnaan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung;
- Menyusun dokumen Perubahan RENSTRA BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Kedua Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, BAPPERIDA Kabupaten Bandung mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder*.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misinya.

Soreang, Januari 2024

**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud & Tujuan	1-4
1.4. Sistematika Penulisan	1-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III-4
3.4. Telaahan Renstra Renstra Provinsi	III-6
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan pada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara spesifik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan RPJMD Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021-2026 serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa BAPPERIDA sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas dan amanat tersebut, maka disusun Perubahan Renstra untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan RPJMD Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Adanya dinamika perubahan kebijakan baik dalam lingkup nasional dalam hal urusan perencanaan maupun keuangan menjadi dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang didalamnya memuat perubahan indikator subkegiatan beserta satuan yang menjadi dasar normatif dalam penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah meliputi perubahan indikator subkegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta penyesuaian target selama dua tahun kedepan sisa periode Renstra Tahun 2021-2026. Perubahan indikator subkegiatan tersebut juga berimplikasi pada penyesuaian indikator kegiatan pada dokumen Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021-2026. Selain itu adanya tantangan dan peluang selama periode Renstra Tahun 2021 sampai dengan 2023 juga menjadi perhatian dalam perumusan perubahan Renstra ini. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renstra BAPPERIDA perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menjawab tantangan dan mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya tertangani pada tiga tahun periode awal Renstra melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan sisa periode Tahun 2025 sampai dengan 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 (Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BAPPERIDA adalah melakukan penyesuaian perubahan indikator subkegiatan beserta target berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu sisa dua tahun kedepan sehingga dapat menghasilkan perencanaan konsisten, sinergis dan akuntabel serta dapat mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah untuk akselerasi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja BAPPERIDA.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya BAPPERIDA, Kinerja Pelayanan BAPPERIDA, Tantangan dan peluang

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPERIDA, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Bandung Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021 mengenai Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah.

Selanjutnya, tugas dan fungsi pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Tugas-tugas perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh BAPPERIDA yang dipimpin oleh pejabat eselon IIB dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan, membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;

- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan,
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
- penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Perencana;
- d. Pelaksana.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana);
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (Perencana);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:

- a. Perencana;
 - b. Pelaksana.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana);
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Perencana);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya, membawahkan:

- a. perencana; dan
- b. Pelaksana.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana);

- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana), Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Perencana);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, dibantu oleh:

- a. Perencana; dan
- b. Pelaksana.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Data dan Informasi Pembangunan Daerah);
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi Perencanaan

Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;

- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:

- a. Perencana; dan
- b. Pelaksana.

7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

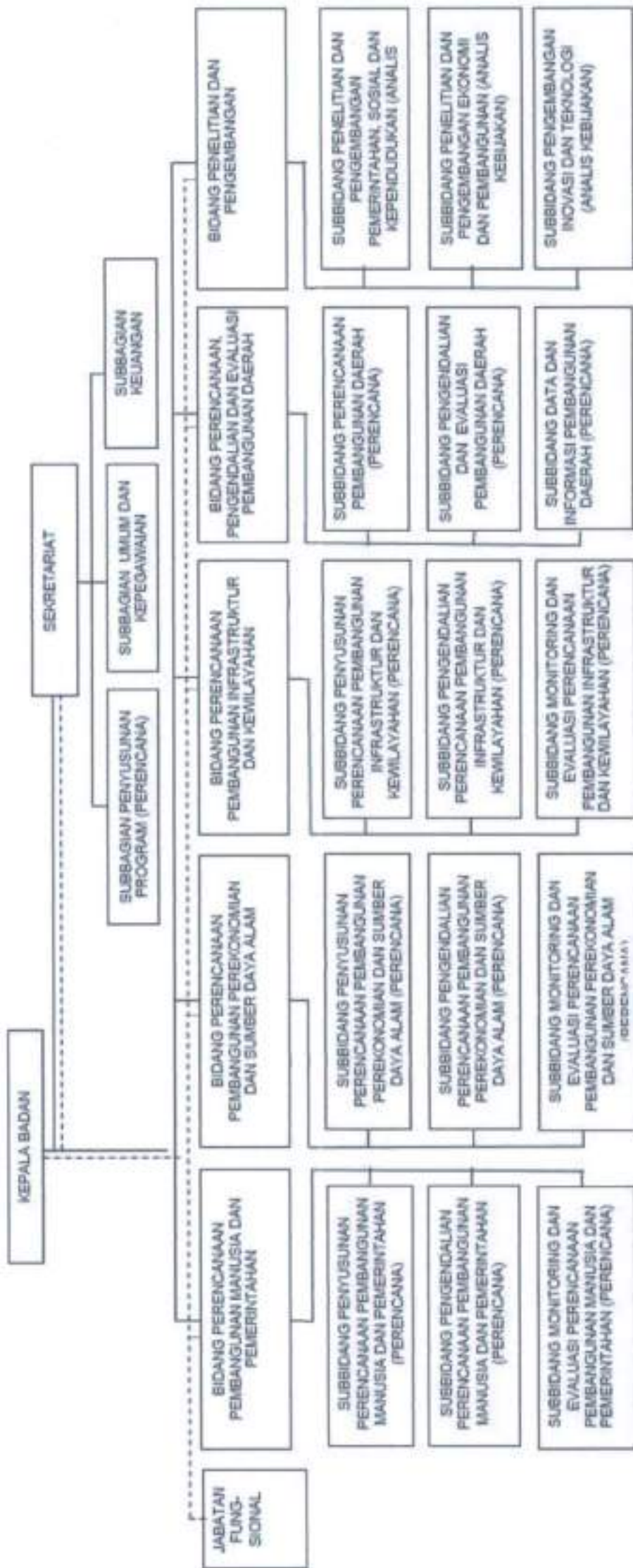
Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas pengembangan riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan riset dan inovasi daerah;
- menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang riset dan inovasi daerah;
- menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang riset dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

- a. Analis Kebijakan;
- b. Pelaksana.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi BAPPERIDA



Secara umum BAPPERIDA merupakan unit organisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu BAPPERIDA juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Dalam kegiatan Musrenbang, BAPPERIDA mengkoordinir proses perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga kabupaten yakni dalam proses Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh BAPPERIDA.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang ada di BAPPERIDA Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

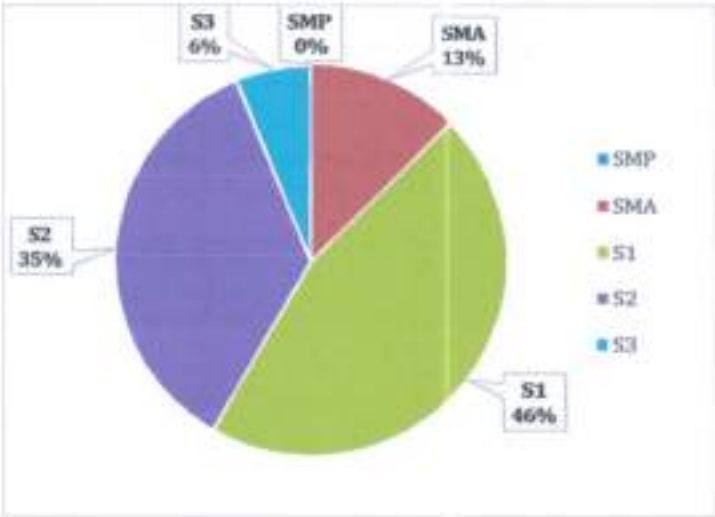
2.2.1. Sumber daya manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada Tahun 2023.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	SMP	0	0
2	SMA	6	12,5
3	S1	22	45,83
4	S2	17	35,42
5	S3	3	6,25
TOTAL		48	100

Sumber : Kepegawatan BAPPERIDA Tahun 2023



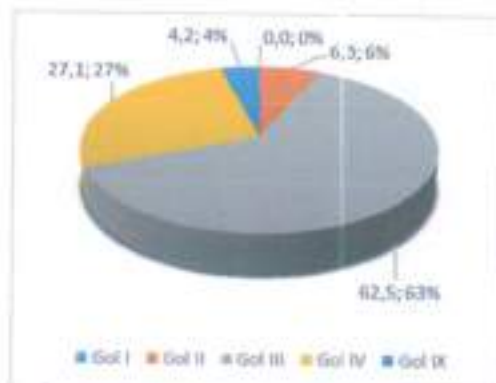
Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SMP sebesar 0%, SMA sebesar 12,5%, S1 sebesar 46%, S2 sebesar 35%, dan S3 sebesar 6%.

Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	Gol I	0	0,0
2	Gol II	3	6,3
3	Gol III	30	62,5
4	Gol IV	13	27,1
5	Gol IX	2	4,2
TOTAL		48	100,0

Sumber : Kepegawaian BAPPERIDA Tahun 2023



Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 6,3%, Golongan III sebanyak 62,5%; Golongan IV

sebanyak 27,1% dan Gplongan IX sebanyak 4,2%. Melihat komposisi tersebut, pagawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung didominasi oleh golongan III.

Jumlah Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pegawai BAPPERIDA Kabupaten Bandung
Berdasarkan Eselon Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah ASN	Persentase (%)
1	Eselon II	1	2,1
2	Eselon III	6	12,5
3	Eselon IV	2	4,2
4	JFT	22	45,8
5	JFU	17	35,4
TOTAL		48	100,0

Sumber : Kepegawaian BAPPERIDA 2023

2.2.2. Sarana dan Prasarana pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung

BAPPERIDA Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas sebesar 1.480 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 11 unit dan roda 2 sebanyak 16 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 28 unit laptop, 20 unit komputer PC dan 8 unit komputer tablet dalam

kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern BAPPERIDA maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. BAPPERIDA memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas $\pm$ 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas perangkat audio visual dan proyektor yang baik. Di lantai 2 (dua) pun disediakan 1 (satu) ruang rapat biasa dengan meja kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 4 (empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan baik dan nyaman.

2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Berikut indikator kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPERIDA
Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran				94,55	92	93	96,2	96,50	97,00	94,55	95,54	95,96	96,76	100	100,00	103,85	103,18	100,58	103,63	103,09	
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD				91,11	93	94	95,70	96	96,50	91,11	95,45	95,59	98,04	94,72	99,97	102,63	101,69	102,45	98,67	103,60	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA				B (69)	B (67)	B (68)	BB (78)	BB (80)	A (81)	B (69)	BB (75,54)	BB (77,33)	A (81,72)	A (82,78)	A (83)	100,00	112,74	113,72	104,76	102,46	
5	Persentase aset dalam kondisi baik				90,62	91	92	93,70	94	94,50	90,62	94,50	93,57	99,48	98,64	96,30	100,00	103,85	101,71	104,94	101,90	

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Lima indikator tersebut merupakan indikator hasil Renstra Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hampir semua indikator kinerja telah memenuhi target bahkan ada yang capaiannya melebihi target. Namun pada indikator "presentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan dalam RKPD" pada tahun 2020 hanya mencapai 94,72% dari target 96% atau dengan rasio capaian sebesar 98,67%. Hal ini disebabkan oleh jumlah usulan DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 sebanyak 6274 usulan dari target 6624 usulan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. kurangnya pemahaman sumber daya aparatur pemerintahan desa atau kecamatan dalam hal mekanisme penentuan daftar prioritas kewenangan suatu program atau kegiatan;
- b. kurang selarasnya daftar skala prioritas dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti RTRW, RPJMD dan RPJPD;
- c. tidak adanya evaluasi dari musrenbangcam/kelurahan dari tahun sebelumnya mengenai usulan Daftar Skala Prioritas (DSP);
- d. adanya perubahan peraturan/perundang-undangan atau baru pada tahun berjalan yang mempengaruhi perencanaan usulan DSP; dan
- e. basis data mengenai DSP yang dimiliki oleh kecamatan belum terorganisir dengan baik.

Berbeda dengan capaian tahun 2020, pada tahun 2021 rasio capaian indikator kinerja sudah melebihi 100%. Hal ini berarti semua capaian kinerja telah melebihi dari yang ditargetkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya penerapan aplikasi Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan bisa selaras dan konsisten sampai dengan tahap penganggaran. Jika dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada gap atau kesenjangan capaian pelayanan pada BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pelayanan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor pendukung internal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Tahun 2016-2021 diantaranya yaitu :

- a. komitmen dan sinergitas antar bidang di BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu;
- b. sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di BAPPEDA Kabupaten Bandung sudah memadai;
- c. keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah;
- d. semua proses perencanaan target kinerja sudah sesuai dengan alur aturan yang berlaku dan tepat waktu; dan
- e. pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan baik dan terbuka.

Adapun faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu:

- a. sinergitas antara BAPPEDA dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan; dan
- b. adanya aplikasi *e-planning* (Simda Integrated) dan SIPD sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi.

Walaupun capaian kinerja pelayanan BAPPEDA sudah baik dan tidak ada *gap* atau kesenjangan tiap tahunnya namun selama rentang tahun 2017-2021 terdapat kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut. Beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

- a. adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan;
- b. sumber daya aparatur khususnya perencana yang masih terbatas dan belum tersebar secara merata;
- c. inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masih terkendala faktor ego sektoral;
- d. aplikasi perencanaan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak *trial and error* dalam penggunaannya sehingga belum optimal dalam implementasinya; dan
- e. manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum optimal.

Jika dilihat dari analisis capaian kinerja BAPPEDA tahun 2017-2021 di atas maka dapat dilihat bahwa BAPPEDA memiliki potensi yang baik untuk melaksanakan kinerja pada periode selanjutnya. Hal ini berdasarkan rerata nilai capaian untuk setiap indikator sudah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dan sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi (*e-Monev*).

Tabel T-C.24. merupakan tabel perbandingan penyerapan anggaran dan realisasi BAPPERIDA Tahun 2017-2021. Khusus untuk realisasi tahun 2021 didapatkan dari realisasi sampai dengan triwulan 1. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio penyerapan anggaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 di atas 80%. Selama periode Renstra tahun 2017-2021, rata-rata anggaran meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp.933.147.941,80 per tahun sedangkan untuk realisasinya sebesar -Rp. 2.483.120.421. Hasil minus tersebut dikarenakan realisasi anggaran pada tahun 2021 masih realisasi untuk triwulan I. Untuk rasio capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu dengan anggaran belanja sebesar Rp. 21.048.777.482 dan realisasi sebesar Rp. 19.918.129.210 atau dengan rasio penyerapan sebesar 94,63% sedangkan untuk rasio realisasi terendah pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 18.482.997.700 dengan realisasi sebesar Rp. 16.040.121.459 atau dengan rasio penyerapan sebesar 86,78%.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Renstra Tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang ada, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta sinergitas antar PD yang baik maupun dengan *stakeholders* lainnya. Pada tahun 2019 terdapat satu kegiatan yang tidak dapat terealisasi yaitu kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan pada program pengembangan data/informasi kelitbang yang sumber anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 150.000.000. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang disediakan atau anggaran tidak mencukupi. Realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan harga satuan barang pada saat perencanaan dan pencairan sehingga terdapat sisa atau kelebihan anggaran pada saat realisasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di

daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada dan pencapaian kinerja selama ini maka tantangan yang akan dihadapi dan menjadi kendala BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam pengembangan pelayanan diantaranya diantaranya yaitu:

- a. Adanya perubahan regulasi baik pusat maupun provinsi;
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Ketersediaan data yang akurat dan *real time* belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- e. manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum memadai;

Sedangkan peluang yang diharapkan mampu menjadi peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada periode Renstra Tahun 2021-2026 diantaranya yaitu:

- a. Sudah tersedianya aplikasi SIPD;
- b. Tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi (sidalmonep);
- c. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- d. Tersedianya dukungan anggaran;
- e. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan; dan

- f. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi BAPPERIDA dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Adapun permasalahan-permasalahan yang didapati BAPPERIDA dalam melaksanakan pelayanannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masaiah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
			Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi dengan optimal karena masih dalam tahap pengembangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Hasil pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan Ketersediaan data analisis capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal Tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti masih terbatas
2	Hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah belum optimal	Penelitian pengembangan dan inovasi yang dilaksanakan belum didasarkan pada isu strategis	Tenaga fungsional peneliti masih terbatas

Selain permasalahan-permasalahan tersebut kendala yang dirasakan selama periode berjalan Renstra BAPPERIDA kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 diantaranya adalah adanya dinamika perubahan kebijakan Nasional berupa Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

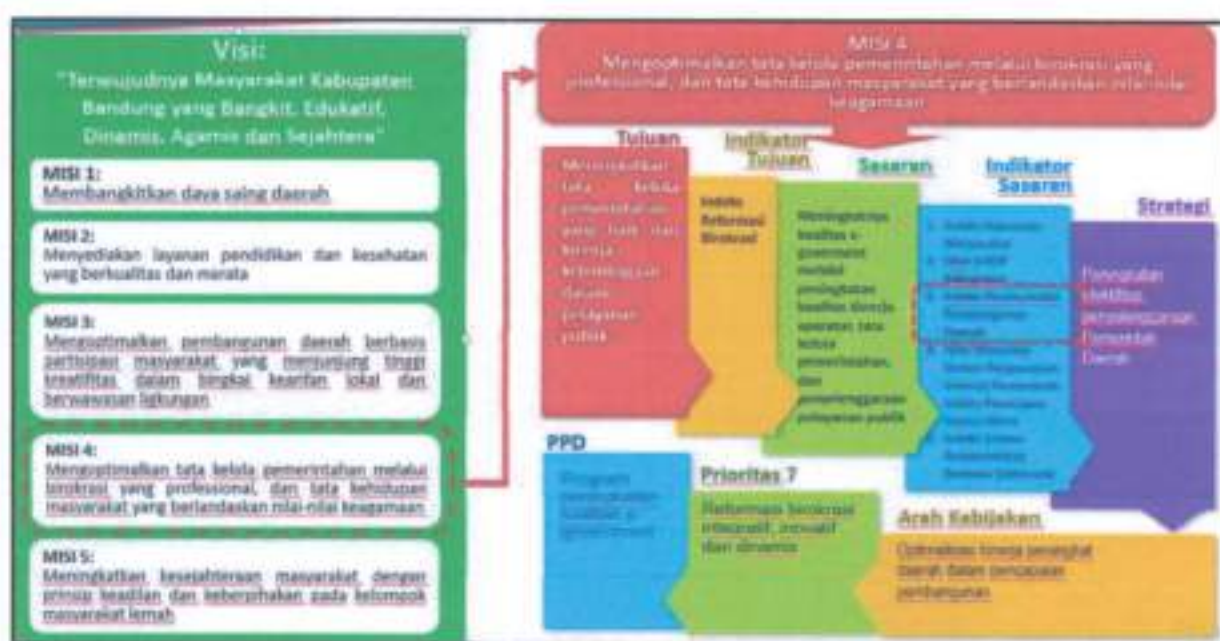
Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPERIDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”, dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangkitkan daya saing daerah;
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan;

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Dalam hal ini, BAPPERIDA Kabupaten Bandung berada dalam misi ke empat yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”, dengan tujuan “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik”, indikator kinerja utama “Indeks reformasi birokrasi”, sasaran “Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik”, dan indikator sasaran “Nilai Sakip Kabupaten” dan “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:



Hasil identifikasi BAPPERIDA tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPERIDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini. Adapun faktor-faktor penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan regulasi baik pusat maupun provinsi;
- b. Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum optimal;
- c. Masih belum optimalnya pengolahan data / informasi hasil penelitian untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Ketersediaan sarana prasarana pendukung belum merata;

- e. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian perencanaan sebelumnya yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan ke depan.
- g. Ketersediaan data yang akurat dan *real time* belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mendukung pelayanan BAPPERIDA diantaranya yaitu:

- a. Adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Adanya jaringan internet penunjang operasional komputer.
- c. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah dilegalformalkan, sehingga mempermudah alokasi dan distribusi anggaran.
- d. Tersedianya dukungan anggaran.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik 38 Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Disamping itu peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran *Clearing House* untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema

pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

Adapun telaahan keterkaitan sasaran Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; serta
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Sasaran tersebut di atas diimplementasikan dalam arah dan kebijakan yang relevan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Kementerian PPN/ Bappenas yang tidak terlepas dari sasaran agenda Nawacita presiden. Adapun arah kebijakan dan strategi yang mendukung sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/ Bappenas adalah:

- a. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).

Kementerian PPN/Bappenas melakukan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis bukti (*evidence based planning*) yang memprioritaskan pada intervensi yang berdasarkan pada data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan serta membuat strategi dalam peningkatan pencapaian pembangunan nasional serta memperkirakan biaya dampak. Bappenas berperan sebagai *clearing house* menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap Visi dan Misi Presiden dan Prioritas Nasional.

- b. Terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan;

Kementerian PPN/Bappenas memaksimalkan fungsi pengendalian untuk memastikan rencana yang telah disusun dan disepakati terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dilakukan dengan optimalisasi system informasi yang ideal dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

- c. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional;

Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan penguatan perencanaan dan penganggaran;
- e. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/ Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Seiring dengan hal tersebut di dalam Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 telah menyebutkan bahwa sasaran untuk mencapai pembangunan tersebut adalah melalui:

1. Adanya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Terpenuhinya semua aspek dalam perencanaan pembangunan yaitu aspek kualitas, proses dan pencapaian pembangunan;
3. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk mendukung dan menyiapkan bahan perencanaan.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antarsasaran dari instansi pusat dengan kabupaten/kota. Lebih lanjut sasaran tersebut dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya.

3.4 Telaahan Renstra Provinsi

Hasil analisis terhadap Renstra BAPPERIDA Provinsi Jawa Barat, BAPPERIDA Kabupaten perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Bandung berdasarkan Sasaran Renstra BAPPERIDA Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPERIDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur BAPPERIDA	- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas	- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan	Tingkat pendidikan SDM BAPPERIDA

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPERIDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan BAPPERIDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPERIDA - Jumlah SDM BAPPERIDA yang telah memiliki sertifikat Pengandaan Barang/Jasa masih sedikit	kewenangan BAPPERIDA. - Masih kurangnya pengiriman diklat struktural dan fungsional SDM BAPPERIDA	mayoritas sarjana
2.	Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan BAPPERIDA	Belum tersedianya SOP.	- Sarana dan yang belum memadai. - Belum adanya standarisasi.	- Keterbukaan komunikasi dan informasi. - Partisipasi dari berbagai stakeholders
3.	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan	Belum adanya sinergitas Perencanaan yang optimal.	- Persepsi yang masih berbeda dan masih munculnya ego sektoral.	- Sektoral mempunyai potensi cukup banyak dan beragam.
4.	Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat	Belum adanya keseragaman data /informasi antara BPS dengan SKPD (basis satu data belum optimal)	- Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPS - manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum memadai	- Kelinginan bersama seluruh SKPD dalam menyamakan dan menseragamkan data yang tersedia. - Optimalisasi forum satu data Kabupaten Bandung

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung yang tertera dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 adalah "Mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam

dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan”.

Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum instansi yang melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah BAPPERIDA namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, instansi yang melaksanakan penyusunan RTRW menjadi beragam di tiap daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengklasifikasikan penataan ruang sebagai sub dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari sub urusan penataan ruang adalah penyusunan RTRW.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan kata lain, penataan ruang yang merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang seharusnya diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang di dalamnya termasuk kegiatan penyusunan RTRW. Namun BAPPERIDA tidak serta merta lepas andil dalam penyusunan RTRW Kabupaten Bandung. BAPPERIDA memiliki fungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan RTRW tersebut khususnya pada bidang perencanaan pembangunan bidang fisik dan infrastruktur.

Selain penyusunan RTRW yang baik, pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009). Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana

Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD ini yaitu untuk melakukan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025. Selain itu penyusunan KLHS ini bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 Tentang RTRW
2.	Pengendalian Penataan ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 Tentang RTRW
3.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal	Anggaran, SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No. 26 Tahun 2017 Tentang RTRW

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masih parsial bersifat		

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah BAPPERIDA Kabupaten Bandung bertujuan sebagai upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen RPJMD dapat dikendalikan.

3.6 Penentuan Isu- isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu analisis isu-isu strategis merupakan langkah awal dalam perencanaan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 isu strategis Kabupaten Bandung meliputi enam kelompok besar yang didalamnya meliputi berbagai permasalahan terkait lingkungan hidup, ekonomi wilayah, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah dan kebencanaan. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu :

1. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing;
2. Belum optimalnya penerapan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan;
3. Belum terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing;
4. Belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan;
5. Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah, dan
6. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan hasil telaahan lainnya serta isu

strategis pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 maka isu strategis yang berkembang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya aparatur khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan serta peneliti yang proporsional sesuai kebutuhan ideal. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi penting sehingga dapat menunjang aktivitas kinerja BAPPERIDA dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen hasil-hasil penelitian menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan di capai BAPPERIDA, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pada tahun selanjutnya.
3. Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (core bisnis), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi BAPPERIDA yang ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini, dokumen-dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh BAPPERIDA merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana-rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum sepenuhnya dari semua sektor melainkan hanya beberapa sektor yang telah berjalan.
4. Optimalisasi hasil kajian/penelitian dan inovasi serta data – data statistik lebih bermanfaat dan informatif, dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhir-akhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan perencanaan.
5. Penyediaan data yang terintegrasi untuk perencanaan pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan informasi dan teknologi. Untuk kondisi saat ini ketersediaan data belum teroganisir dengan optimal bahkan masih terdapat data yang tidak *update/realtime*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan menengah BAPPERIDA Kabupaten Bandung merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih. Tujuan ini dilengkapi dengan indikator sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pada akhir perencanaan.

Dalam renstra perubahan periode Tahun 2021-2026, BAPPERIDA Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-lima yaitu "Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan". Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik, maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung.

Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Bandung terdiri dari dua yaitu "Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPERIDA" dengan indikator tujuan "Nilai AKIP BAPPERIDA " dan "Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah" dengan indikator tujuannya yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan".

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan spesifik untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan sasaran ini dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran yang dilayani dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kabupaten Bandung Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	97,00%	100%
			Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	96,50%	99,97%
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPEDA	Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPERIDA	81 (A)	83 (A)
			Persentase aset dalam kondisi baik	94,50%	96,30%

Tabel 4.1 di atas khusus menerangkan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 yang masih mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan tahun 2021 merupakan masa transisi Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel. 4.2 (Tabel T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SEBELUM PERUBAHAN										SETELAH PERUBAHAN																													
				2021 (Proyeksi)					2022					2023					2024					2025					2026					2027					2028				
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)														
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Bappeda		Nilai AKIP Bapperida	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82,0	81	81,2	83,45	83,50	83,55	83,60																												
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja Bapperida	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82,0	81	81,2	83,45	83,50	83,55	83,60																												
			Persentase BMD dalam kondisi baik	94,50%	98,66%	98,68%	98,70%	98,72%	98,74%	94,50%	98,66%	98,68%	98,70%	98,72%	98,74%																												
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan daerah	78,72%	79,42%	80,12%	80,82%	81,52%	82,22%	78,72%	79,42%	81,69%	82,29%	83,07%	83,77%																												
			Persentase keseluruhan perencanaan dan penganggaran	97%	97,2%	97,4%	97,6%	97,8%	98%	97%	97,2%	97,40%	97,60%	97,80%	98,00%																												
		Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	78,72%	79,42%	80,12%	80,82%	81,52%	82,22%	78,72%	79,42%	81,69%	82,29%	83,07%	83,77%																												
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	20%	30%	40%	50%	60%	70%																												
		Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	20%	30%	40%	50%	60%	70%																												

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut kedalam Strategi dan Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan BAPPERIDA guna mencapai visi dan misi Bupati terpilih adalah dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung misi 4 (mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan).

Untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT adalah salah satu metoda yang digunakan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh suatu organisasi berdasarkan analisis faktor eksternal dan internal suatu organisasi. Pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan BAPPERIDA baik yang berasal dari faktor eksternal dan internal PD itu sendiri. Dari faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasi kemudian dipilih faktor-faktor yang memiliki nilai strategis yang akan digunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Identifikasi dan Analisis Faktor Internal dan Eksternal Lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung

	Potensi	Permasalahan
	Strength	Weakness
Internal	- Motivasi, komitmen dan sinergitas antar bidang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu - Sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung sudah memadai - Keselaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah - Pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel - Data dan informasi pembangunan relatif tersedia	- Jumlah SDM perencana handal yang terbatas dan belum tersebar secara merata - Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masih terkendala faktor ego sektoral - Pemanfaatan dalam penggunaan aset yang ada masih blm optimal - Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal - Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan
	Opportunity	Threat
Eksternal	- Sinergitas antara BAPPERIDA dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan - Adanya aplikasi <i>e-planning</i> (Simda Integrated) dan SIPD sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi. - Peraturan Perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan yang tersedia - Perkembangan teknologi informasi cukup pesat	- Manajemen pengelolaan basis data dan informasi dari Perangkat Daerah belum optimal - Aplikasi perencanaan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak <i>trial and error</i> dalam penggunaannya sehingga belum optimal dalam implementasinya - Adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan - Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal (*strength* dan *weakness*) serta faktor eksternal (*opportunity* dan *treat*) tersebut di atas maka dilakukan pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal tersebut sehingga diperoleh strategi dan arah kebijakan yang strategis untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Tahun 2021-2026. Hasil pemetaan atau interaksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 di bawah ini :

Tabel 5.2 Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal BAPPERIDA Kabupaten Bandung

Faktor Internal Faktor Eksternal	<i>Strengths (Kekuatan)</i>	<i>Weakness (Kelemahan)</i>
	1. Motivasi, komitmen dan sinergitas antar bidang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu 2. Sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di BAPPERIDA Kabupaten Bandung sudah memadai 3. Keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah 4. Pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan transparan dan akuntabel 5. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia	1. Manajemen waktu dan penentuan skala prioritas dalam penyelesaian pekerjaan belum optimal 2. Jumlah SDM perencanaan handal yang terbatas dan belum tersebar secara merata 3. Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masih terkendala faktor ego sektoral 4. Pemanfaatan dalam penggunaan aset yang ada masih blm optimal 5. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal 6. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan
<i>Opportunities (Peluang)</i>	<i>S-O (Upaya Kooperatif)</i>	<i>W-O (Rasionalisasi)</i>
1. Sinergitas antara BAPPERIDA dengan OPD lainnya yang terjalin dengan baik sehingga memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan 2. Adanya aplikasi <i>e-planning</i> (Simda Integrated) dan SIPD sehingga semua data perencanaan dapat terintegrasi. 3. Peraturan Perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan yang tersedia 4. Perkembangan teknologi informasi cukup pesat	1. Pemanfaatan sinergitas dan komitmen antara BAPPERIDA dan OPD mitra dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang selaras, berkualitas dan tepat waktu 2. Pemanfaatan teknologi informasi serta aplikasi perencanaan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatkan kemampuan teknologi dan informasi bagi sumber daya aparatur	1. Pengoptimalan sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan Perangkat Daerah dengan program prioritas daerah 2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi perencanaan yang ada (<i>e-Monev</i>) 3. Optimalisasi penggunaan aplikasi <i>e-planning</i> sehingga semua rangkaian proses perencanaan sudah sesuai dengan alur dan rencana (konsisten).

<i>Threats (Ancaman)</i>	<i>S-T (keuntungan mobilitas)</i>	<i>W-T (status qou)</i>
1. Manajemen pengelolaan basis data dan informasi dari Perangkat Daerah belum optimal 2. Aplikasi perencanaan SIPD yang masih dalam tahap pengembangan sehingga masih banyak <i>trial and error</i> dalam penggunaannya sehingga belum optimal dalam implementasinya 3. Adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan 4. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang	1. Pengelolaan basis satu data Kabupaten Bandung demi keseragaman data perencanaan yang ada 2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang memiliki kapabilitas dalam penguasaan teknologi dan informasi	1. Optimalisasi data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan dari setiap perangkat daerah sebagai bahan proses perencanaan pembangunan selanjutnya

Adapun perumusan strategi dan arah kebijakan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3 (Tabel T-C. 26)
Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera MISI : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i>	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
		Memberikan kesempatan sumber daya aparatur untuk mengikuti diklat teknis untuk meningkatkan kapabilitas dalam bidang perencanaan	Mengikuti diklat atau pelatihan teknis
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan fungsi koordinasi internal dan eksternal serta konsistensi atau keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan Perangkat Daerah dengan program prioritas daerah
			Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
		Meningkatkan standar mutu perencanaan melalui pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan	Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), <i>e-Planning</i> , dan <i>e-Monev</i>

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera				
MISI : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perencanaan pembangunan	Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (<i>e-Money</i>)	Melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja di semua sektor/bidang
			Melaksanakan penelitian/kajian yang didasarkan pada isu-isu strategis	Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah
		Mengadakan penelitian/ kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penelitian/kajian dan inovasi untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Memfasilitasi pengembangan inovasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah
			Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi	

Selain menaungi urusan perencanaan, BAPPERIDA juga menaungi urusan kelitbangan. Hal tersebut sudah terakomodir dalam tujuan dan sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Salah satu sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan dengan indikator sasaran presentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan. Indikator sasaran ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara eksplisit tercantum pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta sub kegiatan Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Adapun proyeksi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Timeline Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Urusan Pemerintahan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	20 %	30%	40%	50%	60%	70%
	-Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	96%	100%	100%	100%	100%	100%
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPERIDA yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan BAPPERIDA yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1(Tabel T-C. 27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
BAPPERIDA Kabupaten Bandung

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi awal (Kinerja Awal Perencanaan Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Personel Dinas	Lokasi										
					2022				2023				2024						2025				2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp				Target		Rp		Target		Rp		Target	Rp
X	PROGRAM PERUBAHAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase	- Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik	- 81 - 94,50 %	- 81,2 - 98,66	13.792.145.000,00	- 83,48 - 98,68	15.719.589.715,00	- 83,50 - 98,70	17.232.156.545,00	- 83,55 - 98,72	22.098.812.048,00	- 83,60 - 98,74	16.098.812.048,00	- 83,60 - 98,74	84.921.518.356,00												
X	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Perentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai kuantitas dan tepat waktu	100%	100	457.800.000,00	100	292.500.000,00	100	123.000.000,00	100	437.500.000,00	100	227.500.000,00	100	1.518.000.000,00												
X	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3 Dok	292.500.000,00	2 Dok	200.000.000,00	2 Dok	75.000.000,00	3 Dok	262.500.000,00	12 Dok	90.000.000,00	Dok	940.000.000,00												
X	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen REA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen REA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen REA-SKPD	1 Dok	2 Dok	10.000.000,00	2 Dok	7.500.000,00	2 Dok	5.000.000,00	2 Dok	8.000.000,00	2 Dok	10.000.000,00	Dok	37.500.000,00												
X	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan REA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	2 Dok	10.000.000,00	2 Dok	5.000.000,00	2 Dok	1.000.000,00	2 Dok	5.000.000,00	2 Dok	10.000.000,00	Dok	31.000.000,00												

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan Tahun 2021	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Peringkat Daerah						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
X	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	2	Dok	1.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	10	Dok	31.000.000,00	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2	10.000.000,00	2	5.000.000,00	2	Dok	1.000.000,00	2	Dok	5.000.000,00	2	Dok	10.000.000,00	10	Dok	31.000.000,00	Kab. Bandung
X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	3	50.000.000,00	2	25.000.000,00	2	Laporan	10.000.000,00	2	Laporan	50.000.000,00	2	Laporan	40.000.000,00	10	Laporan	175.000.000,00	Kab. Bandung
X	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	3 Dok	1	75.000.000,00	1	45.000.000,00	1	Laporan	10.000.000,00	1	Laporan	75.000.000,00	1	Laporan	47.500.000,00	5	Laporan	272.500.000,00	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					2022			2023			2024			2025					2026			Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Peringkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Penyusunan dan Pelaksanaan Statistik Sektorial Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Waduk/daerah Pendukung Statistik Sektorial Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan										Unit Kerja Penerimaan Dana dan Penerimaan Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
X	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	-	-	0,00	2	Dok	10.000,00 0,00	2	Dok	10.000,00 00,00	2	Dok	10.000,00 00,00	40.000,00 00,00	Kab. Bandung	
X	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Trisemesterian SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterian SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterian SKPD	1 Dok	12	20.000,00 00,00	12	Laporan	20.000,00 0,00	12	Laporan	15.000,00 00,00	12	Laporan	15.000,00 00,00	85.000,00 00,00	Kab. Bandung	
X	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1	10.000,00 00,00	1	Dok	10.000,00 0,00	1	Dok	10.000,00 00,00	1	Dok	10.000,00 00,00	50.000,00 00,00	Kab. Bandung	
X	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	N/A	-	0,00	100	%	26.000,00 0,00	100	%	10.000,00 000,00	100	%	20.000,00 000,00	66.000,00 000,00	Kab. Bandung	
X	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	-	0,00	1	Dokumen	10.000,00 0,00	1	Dokumen	5.000,00 0,00	1	Dokumen	10.000,00 00,00	30.000,00 00,00	Kab. Bandung	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perencanaan Daerah dan Peningkatan Jarak	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					2022		2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
X	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barung Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barung Milik Daerah pada SKPD	N/A	-	0,00	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan</

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perencanaan Daerah	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	10	50.000,00	10	30.000,00	10	20.000,00	10	300.000,00	10	85.000,00	50	485.000.000,00	Kab. Bandung	
X	Administrasi Umum Pengusutan Daerah	Persentase	Persentase Dokumen penemuan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100	679.000.000,00	100	574.982.500,00	100	950.860.845,00	100	914.329.000,00	100	384.000.000,00	100	3.503.042.345,00	Kab. Bandung	
X	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Jenis	1	20.000,00	1	23.952,50	1	25.000,00	1	18.100,00	1	20.000,00	5	107.052.500,00	Kab. Bandung	
X	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Jenis	1	420.000,00	1	284.000,00	1	404.764.345,00	1	450.000,00	1	100.000,00	5	1.658.764.345,00	Kab. Bandung	
X	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Paket	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	1	10.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000,00	1	16.120,00	1	10.000,00	5	42.129.000,00	Kab. Bandung	
X	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Jumlah Paket beban Logistik yang Disediakan	3 Jenis	1	20.000,00	1	20.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	50.000,00	5	250.000.000,00	Kab. Bandung	
X	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Jenis	1	40.000,00	1	25.000,00	1	30.096,500,00	1	25.000,00	1	30.000,00	5	150.096.500,00	Kab. Bandung	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	Lokasi						
					2022			2023			2024			2025					2026			Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
X	Pengadaan Bahan Baras dan Perlengkapan Perundang-undangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Baras dan Perlengkapan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Jenis	1 Dok	24.000,00	1 Dok	74.000,00	1 Dok	235.000,00	1 Dok	35.000,00	1 Dok	24.000,00	5	392.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						
X	Facilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200 Box	12 Laporan	50.000,00	12 Laporan	50.000,00	12 Laporan	50.000,00	12 Laporan	50.000,00	12 Laporan	50.000,00	60	250.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						
X	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	200 Hek	12 Laporan	95.000,00	12 Laporan	95.000,00	12 Laporan	103.000,00	12 Laporan	220.000,00	12 Laporan	100.000,00	60	613.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						
			Konsepansi SKPD	100%	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	870.000,00	100 %	1.130.000,00	100 %	100.000,00	100 %	2.100.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						
X	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	820.000,00	1 Unit	1.000,00	1 Unit	30.000,00	4 t	1.850.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						
X	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Jenis	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	50.000,00	1 Paket	100.000,00	1 Paket	50.000,00	5	200.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						
X	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	0	0 unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	15.000,00	1 Unit	10.000,00	4 t	25.000,00	Bappel itbang da	Kab. Banteng						

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja	Lokasi			
					2022			2023			2024			2025					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangko Daerah		
					Target	Rp	Unit	Target	Rp	Unit	Target	Rp	Unit	Target	Rp	Target			Rp	Unit	Rp
	Daerah																				
X	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemungutan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Kendaraan Pemungutan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	34 Unit	24	245.000.000,00	Unit	34	175.000.000,00	Unit	24	145.000.000,00	Unit	24	145.000.000,00	Unit	120	855.000.000,00	Bappeda	Kab. Bandung	
X	Pemeliharaan Perawatan dan Merawat Lainnya	Unit	Jumlah Perawatan dan Merawat Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20	50.000.000,00	Unit	30	50.000.000,00	Unit	20	50.000.000,00	Unit	20	50.000.000,00	Unit	100	250.000.000,00	Bappeda	Kab. Bandung	
X	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1	100.000.000,00	Unit	1	0,00	Unit	1	130.000.000,00	Unit	1	250.000.000,00	Unit	5	380.000.000,00	Bappeda	Kab. Bandung	
X	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	0,00	Unit	1	0,00	Unit	1	0,00	Unit	1	3.300.000.000,00	Unit	4	3.320.000.000,00	Bappeda	Kab. Bandung	
X	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0,00	Unit	1	150.000.000,00	Unit	1	120.000.000,00	Unit	1	300.000.000,00	Unit	4	690.000.000,00	Bappeda	Kab. Bandung	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERBAHAGUAN DAERAH	Persentase	Capaian nilai PPD	86,50 %	87,6 %	2.649.984.000,00	88,7 %	2.061.423.523,00	89,8 %	3.489.311.000,00	90,9 %	3.405.096.000,00	92 %	2.823.130.200,00	92 %	14.580.144.727,00	Bappeda Kabupaten	
5	Pengusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase belanja secara langsung	100%	100 %	1.526.231.000,00	100 %	1.191.291.823,00	100 %	2.198.084.900,00	100 %	2.014.343.000,00	100 %	1.824.231.000,00	100 %	8.456.181.922,00	Bappeda Kabupaten	
5	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Strategi Pengembangan Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RUMD/RKP D (Seuai Keputusan Jika RUMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	1 Dok	273.314.000,00	1 Dok	164.163.722	1 Dok	423.314.000,00	2 Dok	400.000.000,00	1 Dok	273.314.000,00	6	1.534.105.722,00	Bappeda Kabupaten	
5	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Telaahan dok. DAK, Barieris Pro, DID, DBHCHT)	3 Dok	3 Dok	114.343.000,00	3 Dok	52.583.000		0,00		114.343.000,00		0,00	6	381.269.000,00	Bappeda Kabupaten	
		Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00		0,00	3 Dok	114.343.000,00	3 Dok		3 Dok	114.343.000,00	9	228.686.000,00	Bappeda Kabupaten	

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan										Unit Kerja Perencanaan Daerah	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Peringkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
5	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Keg	1 Dok	250.000.000,00	1 Berita Acara	172.756,00	1 Berita Acara	331.853.800,00	2 Berita Acara	400.000.000,00	1 Berita Acara	250.000.000,00	6 Berita Acara	1.404.600.800,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Banjarnegara
5	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Daerah (BA, PO, Kewilayahan dan BA Lintas PD)	1 Keg	1 Dok	200.000.000,00	1 Berita Acara	135.100,00		0,00		200.000.000,00		0,00	2 Berita Acara	535.100.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Banjarnegara
		Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah			0,00	1 Berita Acara	0,00	1 Berita Acara	200.000.000,00	1 Berita Acara		1 Berita Acara	200.000.000,00	3 Berita Acara	400.000.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Banjarnegara
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Keg	1 Dok	420.657.000,00	1 Berita Acara	398.771,80	1 Berita Acara	620.657.000,00	2 Berita Acara	500.000.000,00	1 Berita Acara	420.657.000,00	6 Berita Acara	2.360.742.800,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Banjarnegara
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RAN, RPJPD/RAN, RPJPD/RAN)	3 Dok	2 Dok	267.917.000,00	2 Dok	267.917,00	2 Dok	507.917.000,00	3 Dok	400.000.000,00	2 Dok	267.917.000,00	11 Dok	1.711.668.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Banjarnegara
5	Analisis Data dan Informasi Pemertanahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentasi	- Presentasi masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilakukan di perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	609.553.000,00	100 %	360.000,00	100 %	559.553.000,00	100 %	609.553.000,00	100 %	609.553.000,00	100 %	2.894.412.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Banjarnegara

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Dukungan Kegiatan	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Masyarakat	- Jumlah Masyarakat Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	3	146.200.000,00	3	105.274.500				0,00			6	397.674.500,00	Kab. Bantul	
						0,00		0,00										
		Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)														Kab. Bantul	
5	Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Pembangunan SKPD	Orang	- Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemantauan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi	1 Dok	68	333.582.000,00	68	161.339,335							272	1.445.667.335,00	Kab. Bantul	
5	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Dok	1	129.771.000,00	1	93.266,165							5	657.470.165,00	Kab. Bantul	

Kode dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan										Unit Kerja Perencanaan dan Penganggaran	Lokasi							
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Peringkat Daerah						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
5	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	Persentase Peringkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	95%	95,2	%	814.200.000,00	95,4	%	337.000.000,00	95,6	%	553.527.005,00	95,8	%	581.200.000,00	96	%	514.200.000,00	96	%	2.900.127.065,90	Kab. Bandung
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dok	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	119.887,600	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	231.200.000,00	1	Laporan	1.044,687.500,00	Kab. Bandung
5	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dok	2	Laporan	283.000.000,00	2	Laporan	217.112,400	2	Laporan	322.327.005,00	2	Laporan	350.000.000,00	2	Laporan	283.000.000,00	2	Laporan	1.455,439.405,00	Kab. Bandung
5	Implementasi Sistem Informasi Pemantauan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase	Persentase ketersediaan dokumen SIPD	N/A			0,00	100	%	173.132,000,00	100	%	178.146.200,00	100	%	200.000.000,00	100	%	178.146.200,00	100	%	729.424.400,00	Kab. Bandung
5	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota	N/A			0,00	1	Dokumen	173.132,000	1	Dokumen	178.146.200,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	178.146.200,00	1	Dokumen	729.424.400,00	Kab. Bandung

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan Tahun 2021	Tahun Pelaksanaan												Unit Kerja Penerima Dana	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase	1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan dengan RKPD RPJMD - Peningkatan pelaksanaan kegiatan dengan RKPD - Peningkatan pelaksanaan kegiatan dengan RKA dengan RKPD	100%	97,2 % 97,2 % 97,2 %	3.602.700.000,00	97,4 % 97,4 % 97,4 %	1.989.000.000,00	97,6 % 97,6 % 97,6 %	2.577.700.000,00	97,8 % 97,8 % 97,8 %	2.674.500.000,00	98 % 98 % 98 %	2.674.500.000,00	98 % 98 % 98 %	12.818.400.000,00	Suplai barang dan	
6	Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat	Persentase	1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan dengan RKPD RPJMD - Peningkatan pelaksanaan kegiatan dengan RKPD - Peningkatan pelaksanaan kegiatan dengan RKA dengan RKPD	99 % 74 %	97,2 % 97,2 % 97,2 %	864.500.000,00	97,4 % 97,4 % 97,4 %	632.000.000,00	97,6 % 97,6 % 97,6 %	864.500.000,00	97,8 % 97,8 % 97,8 %	892.500.000,00	98 % 98 % 98 %	892.500.000,00	98 % 98 % 98 %	4.146.000.000,00	Suplai barang dan	

No Urut	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Kualitas Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Pelaksanaan										Unit Kerja Fasilitas Dua h Penan gung Jawab	Loka si	
				2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Perangkat Daerah
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	0,00	1	0,00	38	125.813. 000,00	Lapor an	38	Lapor an	118.500. 000,00	Lap oran	362.813. 000,00	Kab. Ban dung
5	Pelembagaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	97.500.0 00,00	1	97.500.0 00,00	1	92.749.5 00,00	Lapor an	1	Lapor an	97.500.0 00,00	Lap oran	424.289. 500,00	Kab. Ban dung
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Disoordinir Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	259.000. 000,00	1	318.000.0 00	1	249.413. 000,00	Dok	1	Dok	259.000. 000,00	Dok	1.344.41 3.000,00	Kab. Ban dung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangko Daerah Penerima Jarak	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangko Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangko Daerah	Jumlah Perangko Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	11	Perangko Daerah	11	Perangko Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	22	Perangko Daerah	176.000.000,00	Kab. Banting		
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						11	Laporan	11	Laporan	33	Laporan	373.159.100,00	Kab. Banting		
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangko Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangko Daerah	Jumlah Perangko Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	11	Perangko Daerah	11	Perangko Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	22	Perangko Daerah	147.000.000,00	Kab. Banting		
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Rencana/Renja Bidang Pembangunan Manusia						11	Laporan	11	Laporan	33	Laporan	280.539.700,00	Kab. Banting		

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan Tahun 2021	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangko Daerah	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Perangkat at Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Perencanaan	1 Dik	8	195.459.000,00	8	141.900.000		0,00		0,00		0,00	16	337.359.000,00	Rappel ibang da	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan			0,00		0,00	8	170.459.000,00	8	195.459.000,00	8	195.459.000,00	24	561.377.000,00	Rappel ibang da	Kab. Bandung
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Perangkat at Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Perencanaan	0	8	163.650.000,00	8	73.000.000		0,00		0,00		0,00	16	236.650.000,00	Rappel ibang da	Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan			0,00		0,00	8	163.650.000,00	8	163.650.000,00	8	163.650.000,00	24	490.950.000,00	Rappel ibang da	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Kinerja (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perangko Daerah	Lokasi			
					2022		2023		2024		2025		2026								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Perangkoat Daerah						
															Target	Rp					
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RZPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Diskoordinir Penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RZPD)	0	1	Dok	109.000.000,00	1	Dok	109.000.000,00	2	Dok	109.000.000,00	1	Dok	109.000.000,00	6	Dok	518.000.000,00	Rappel itbang da	Kab. Ban dung
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana/Ren ja Bidang SDA	0	8	Perangkoat Daerah	127.541.000,00	8	Perangkoat Daerah	138.100.000		0,00	0,00		Perangkoat Daerah	263.641.000,00	16	Perangkoat Daerah		Rappel itbang da	Kab. Ban dung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				0,00	8	Laporan	0,00	8	Laporan	127.541.000,00	8	Laporan	127.541.000,00	24	Laporan	382.623.000,00	Rappel itbang da	Kab. Ban dung
5	Pelembagaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana/Ren ja Bidang SDA	0	8	Perangkoat Daerah	166.350.000,00	8	Perangkoat Daerah	85.000.000		0,00	0,00		Perangkoat Daerah	251.350.000,00	16	Perangkoat Daerah		Rappel itbang da	Kab. Ban dung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan				0,00	8	Laporan	0,00	8	Laporan	166.350.000,00	8	Laporan	166.350.000,00	24	Laporan	499.050.000,00	Rappel itbang da	Kab. Ban dung

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan										Unit Kerja Perangko Daerah	Lokasi				
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Perangko Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disosordinir Penyusunan RPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1	Dok	171.100.000,00	1	Dok	171.100.000,00	2	Dok	1	Dok	200.000.000,00	5	Dok	897.200.000,00	Kab. Bandung	
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Berita/Rencana Bidang Infrastruktur	1 Dok	8	Perangkat Daerah	100.000.000,00	8	Perangkat Daerah	117.000.000,00		0,00		16	Perangkat Daerah	217.000.000,00				Kab. Bandung
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				0,00	8	Laporan	100.000.000,00	6	Laporan	8	Laporan	100.000.000,00	24	Laporan	300.000.000,00	Kab. Bandung	
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Berita/Rencana Bidang Infrastruktur	1 Dok	8	Perangkat Daerah	162.430.000,00	8	Perangkat Daerah	140.000.000,00		0,00		16	Perangkat Daerah	302.430.000,00				Kab. Bandung

No. dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Peran giat Daerah	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan	Peringkat Daerah	Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Dok	8	125.570.000,00	8	Peringkat Daerah	80.000,00	0,00	8	125.570.000,00	16	205.570.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Bantul		
		Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan			0,00			0,00		8	Laporan	125.570.000,00	24	376.710.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Bantul	
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	96%	30	851.000.000,00	40	%	4.000.184.000,00	60	70	4.001.000.000,00	70	15.484.184.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Bantul		
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Peraturan	Persentase	Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan	96%	100	253.000.000,00	100	%	843.308.000,00	100	100	378.000.000,00	100	3.230.208.000,00	Bappeda Kabupaten	Kab. Bantul		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan										Unit Kerja Peran Dinas Daerah	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		sin dan pengkajian peraturan													
5	Pengelolaan Data Kelahiran dan Perawatan	Jumlah Data Kelahiran dan Perawatan yang Terkela dengan baik	1 Dok	1	Laporan 253.000.000,00	1	Laporan 843.208.000	1	Laporan 378.000.000,00	1	Laporan 378.000.000,00	5	Laporan 2.230.206.000,00	Bappeditbang dan	Kab. Banteng
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase ketertarikan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-	100 %	0,00	100 %	828.540.000,00	100 %	992.000.000,00	100 %	992.000.000,00	100 %	1.404.840.000,00	Bappeditbang dan	Kab. Banteng
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	0 Dok	0,00	1 Dok	528.540.000	1 Dok	292.000.000,00	1 Dok	292.000.000,00	4	Dok 1.404.340.000,00	Bappeditbang dan	Kab. Banteng
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00	2	Dok 200.000.000,00	Bappeditbang dan	

No da	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sarana, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Pern gkat Daerah Jawa	Loka si																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					2022		2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Perencanaan Daerah	Lokasi			
					2022			2023			2024			2025					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Strategis Daerah		
					Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp			Target		Rp
			Partisipasi Masyarakat																		
5	Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase	Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	96%	100 %	305.000.000,00		100 %	1.483.436.000,00		100 %	2.039.000.000,00		100 %	1.742.357.060,00		100 %	1.742.357.060,00		7.282.150.120,00	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dok	1 Dok	205.000.000,00		1 Dok	673.786,00		1 Dok	250.000.000,00		1 Dok	132.623.000,00		1 Dok	132.623.000,00		1.394.002.000,00	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		0 Dok	0,00		1 Dok	0,00		1 Dok	249.000.000,00		1 Dok	173.149.000,00		1 Dok	173.149.000,00		635.298.000,00	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Mikro Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Mikro Daerah	-	0 Dok	0,00		1 Dok	0,00		1 Dok	292.000.000,00		1 Dok	189.060.860,00		1 Dok	189.060.860,00		670.121.720,00	Kab. Bandung

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Utama, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Penerima Dana	Lokasi					
					2023			2024			2025			2026					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Perangkat Daerah				
					Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp			Target		Rp		
					Target	Dok	0,00	1	Dok	363.150,00	1	Dok	292.000,000,00	1	Dok	103.394,000,00			1	Dok	103.394,000,00	4	Dok
5	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Pangan	-	0	Dok	0,00	1	Dok	363.150,00	1	Dok	292.000,000,00	1	Dok	103.394,000,00	1	Dok	103.394,000,00	4	Dok	851.938.000,00	Kab. Bantul
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	111.000,000,00	1	Dok	111.000,000,00	2	Dok	222.000,000,00	Kab. Bantul
5	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	0	Dok	0,00	1	Dok	0,00	1	Dok	292.000,000,00	1	Dok	169.264,000,00	1	Dok	169.264,000,00	4	Dok	628.529,200,00	Kab. Bantul
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	116.000,000,00	1	Dok	116.000,000,00	2	Dok	232.000,000,00	Kab. Bantul
	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	0	Dok	0,00	1	Dok	116.000,000,00	1	Dok	116.000,000,00	2	Dok	232.000,000,00	Kab. Bantul

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan								Unit Kerja Peran Dasar & Penanggung Jawab	Lokasi				
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Perangbait Daerah	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	0 Dok	0 Dok	0,00	1 Dok	116.000.000,00	1 Dok	116.000.000,00	2 Dok	232.000.000,00		
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0 Dok	0,00	0 Dok	0,00	0 Dok	0 Dok	0,00	1 Dok	116.000.000,00	1 Dok	116.000.000,00	2 Dok	232.000.000,00		
5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 Dok	0,00	1 Dok	166.500,00	1 Dok	1 Dok	374.000.000,00	1 Dok	157.000.600,00	1 Dok	157.000.600,00	4 Dok	628.891.200,00		
	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Perumahan	0 Dok	0,00	1 Dok	166.500,00	1 Dok	1 Dok	374.000.000,00	1 Dok	157.000.600,00	1 Dok	157.000.600,00	4 Dok	628.891.200,00		
	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Perumahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Perumahan	0 Dok	0,00	1 Dok	166.500,00	1 Dok	1 Dok	374.000.000,00	1 Dok	157.000.600,00	1 Dok	157.000.600,00	4 Dok	628.891.200,00		
5	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	250.000.000,00	1 Dok	1 Dok	250.000.000,00	1 Dok	143.770.000,00	1 Dok	143.770.000,00	5 Dok	887.540.000,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Saluran	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan										Unit Kerja	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pusat	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	96%	100 %	293.000.000,00	100 %	1.175.000.000,00	100 %	888.642.940,00	100 %	888.642.940,00	100 %	4.537.285.880,00	Bappeda Bandung	Kab. Bandung
5	Penelitian, Pengembangan dan Penguatan Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penguatan Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1 Dok	293.000.000,00	1 Dok	1.175.000.000,00	1 Dok	292.000.000,00	1 Dok	292.000.000,00	1 Dok	2.444.000.000,00	Bappeda Bandung	Kab. Bandung
5	Diseminasi, Sosialisasi, dan Penguatan Metode Penelitian yang Berbasis Inovatif	Laporan	Jumlah Laporan Diseminasi, Sosialisasi, dan Penguatan Metode Penelitian yang Berbasis Inovatif			0,00	1	0,00	1	219.613.300,00	1	219.613.300,00	1	739.225.600,00	Bappeda Bandung	Kab. Bandung
5	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keluaran	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keluaran			0,00	1	0,00	1	217.700.000,00	1	217.700.000,00	1	735.400.000,00	Bappeda Bandung	Kab. Bandung
5	Penelitian dan Pengembangan Inovatif	Laporan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Inovatif			0,00	1	0,00	1	159.329.640,00	1	159.329.640,00	1	618.659.280,00	Bappeda Bandung	Kab. Bandung
						6.193.684.000,00		8.050.607.522,00		10.880.596.000,00		9.593.630.200,00		42.552.728.727,00		

No dan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kondisi awal Kinerja Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Tahun Perencanaan												Unit Kerja Pusat Daerah Pemasangan Jarak	Lokasi
					2023		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						19.898.829.000,00		23.770.197.237,00		27.300.167.550,00		32.179.406.048,00		35.602.443.248,00		127.474-344.083,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam lima tahun mendatang yaitu untuk mendukung pencapaian misi ke-4 Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu: "Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan", dengan tujuan "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik", indikator kinerja utama "Indeks reformasi birokrasi", sasaran "Meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik", dan indikator sasaran "Nilai Sakip Kabupaten" dan "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah".

Secara umum, indikator kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 (Tabel T-C. 28)
Indikator Kinerja BAPPERIDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai akuntabilitas kinerja Bappeda	81 (A)	81,2 (A)	83,45 (A)	83,50 (A)	83,55 (A)	83,6 (A)	83,6 (A)
2	Persentase BMD dalam kondisi baik	94,50%	98,66%	98,68%	98,70%	98,72%	98,74%	98,74%
3	Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran	97%	97,2%	97,4%	97,6%	97,8%	98%	98%
4	Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan	78,72%	79,42%	81,69%	82,29%	83,07%	83,77%	83,77%

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Presentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan. Perubahan Renstra ini telah menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA Kabupaten Bandung pada sisa dua tahun periode terakhir.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional

Soreang, Januari 2024
KEPALA BAPPERIDA,
ttd

ERWIN RINALDI
NIP. 19671110 199303 1 012
BUPATI BANDUNG,



MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA